

# **Strategi Komunikasi Islam Nahdlatul Ulama Dalam Panggung Politik Melalui Kontestasi Pilkada Di Jawa Timur**

Hamim<sup>1</sup>, Teguh Priyo Sadono<sup>2</sup>, Bambang Sigit Pramono<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

<sup>1,2,3</sup> Jl. Semolowaru No. 45, Surabaya

<sup>1</sup>hamim@untag-sby.ac.id, <sup>2</sup>teguhsadono@untag-sby.ac.id, <sup>3</sup>sigit99@untag-sby.ac.id

## **Abstrak**

Saat ini keberadaan NU dibawah naungan organisasi, namun dalam dinamika politik sangat diperhitungkan. Penelitian ini membahas peran strategis Nahdlatul Ulama (NU) dalam dinamika politik melalui kontestasi Pilkada di Jawa Timur, dengan fokus pada pendekatan komunikasi Islam yang diterapkan. Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan opini publik, pola komunikasi politik, dan mobilisasi massa dalam ajang politik lokal. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana NU memanfaatkan prinsip-prinsip komunikasi Islam, seperti dakwah bil hikmah, keadilan, dan kebersamaan, untuk membangun strategi yang efektif dalam mendukung calon tertentu. Secara implisit NU mempunyai kedudukan yang lebih tinggi diatas partai dalam panggung politik. Dalam konteks komunikasi politik keberadaan NU, tidak lepas dari peran kiai dan santri, baik dalam panggung depan maupun panggung belakang. Metode penelitian yang digunakan meliputi pendekatan kualitatif dengan analisis data dari wawancara mendalam, studi literatur, dan observasi partisipatif terhadap dinamika Pilkada di Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan NU tidak hanya berorientasi pada politik elektoral tetapi juga mencerminkan upaya menjaga harmoni sosial dan nilai-nilai keislaman di masyarakat. NU menggunakan jaringan pesantren, tokoh agama, dan tradisi budaya lokal sebagai media komunikasi yang kuat untuk memperkuat pengaruhnya. Hasil penelitian konsep dramaturgi dan permainan peran yang dilakukan oleh para kandidat, menciptakan suasana dan kondisi interaksi yang kemudian memberikan makna tersendiri bagi masyarakat. Munculnya pemaknaan ini sangat tergantung pada latar belakang sosial masyarakat itu sendiri dan terbentuk masyarakat yang mampu beradaptasi dengan berbagai suasana, corak kehidupan politik.

**Kata Kunci:** *Komunikasi Islam; Dramaturgi; Nahdlatul Ulama*

Diterima: 24-10-2024

Disetujui: 16-01-2025

Dipublikasikan: 31-01-2025

# ***Islamic Communication Strategy Of Nahdlatul Ulama On The Political Stage Through Regional Election Contestation In East Java***

## **Abstract**

*Currently the existence of NU is under the auspices of the organization, but in political dynamics it is very calculated. This research discusses the strategic role of Nahdlatul Ulama (NU) in political dynamics through the contestation of Pilkada in East Java, focusing on the Islamic communication approach applied. As the largest Islamic organization in Indonesia, NU has a significant influence on the formation of public opinion, political communication patterns, and mass mobilization in the local political arena. This research explores how NU utilizes Islamic communication principles, such as da'wah bil hikmah, justice, and togetherness, to build an effective strategy in supporting certain candidates. Implicitly, NU has a higher position than parties in the political arena. In the context of political communication, the existence of NU cannot be separated from the role of kiai and santri, both in the front stage and the back stage. The research method used includes a qualitative approach with data analysis from in-depth interviews, literature studies, and participatory observation of the dynamics of Pilkada in East Java. The results showed that NU's approach was not only oriented towards electoral politics but also reflected efforts to maintain social harmony and Islamic values in society. NU uses pesantren networks, religious leaders, and local cultural traditions as strong communication media to strengthen its influence. The research results of the concept of dramaturgy and role-playing carried out by the candidates, creating an atmosphere and conditions of interaction which then give its own meaning to the community. The emergence of this meaning is highly dependent on the social background of the community itself and forms a society that is able to adapt to various atmospheres, patterns of political life.*

**Keywords:** Islamic Communication; Dramaturgy; Nahdlatul Ulama

## **PENDAHULUAN**

Untuk memperoleh dukungan warga NU, memang sebuah keharusan jika ingin ikut kontestasi politik di Jatim. Pilgub Jawa Timur lebih menarik karena, warga NU selalu digiring untuk memilih kandidat yang merupakan figur dari kalangan NU sendiri. Pertaruhan memperoleh tiket ke kursi gubernur Jatim yang kedua kalinya, masih menyisakan rasa penasaran Khofifah. Secara popularitas, nama Khofifah Indar Parawansa, yang memiliki tingkat popularitas paling tinggi di antara kandidat lainnya. Adapun terkait akseptabilitas dari kandidat NU, Khofifah Indar Parawansa merupakan kandidat yang paling disukai oleh publik. Membaca sinyal dukungan NU dalam Pilgub Jatim

memang selalu tampak terbelah, terlebih jika ada beberapa calon yang masing-masing merupakan representasi dari kekuatan politik NU itu sendiri.

Bagi masyarakat Jatim NU tidak sekedar simbol organisasi, melainkan interpretasi dalam menganut ajaran agama dan bermasyarakat bahkan dalam berpolitik. Kehadiran kader NU yang berperan sebagai kandidat utama dalam panggung politik pilkada Jatim 2018 membuat masyarakat Jatim sangat dilematis. Kontestasi kandidat secara eksplisit mampu mengkonstruksi pemaknaan publik yang beraneka ragam, karena kedua kandidat utama sama-sama dibesarkan oleh NU dan mempunyai latarbelakang santri. Sehingga persaingan kedua kandidat betul-betul *head to head*. Ini terjadi karena dinamika panggung politik

Jawa Timur sangat tinggi, bahkan tingkat heteroginitas yang lebih tinggi dibanding wilayah lain.

Jawa Timur tetap menjadi barometer perkembangan politik nasional, sehingga memunculkan adagium bahwa untuk memenangkan kontestasi politik nasional harus memenangkan Jawa Timur terlebih dahulu. Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) di Jawa Timur akan dilakukan serentak, dengan melibatkan 18 Kota dan Kabupaten untuk memilih Walikota/Bupati, dan satu Pilkada untuk memilih kepala daerah provinsi (Gubernur).

## KAJIAN PUSTAKA

Politik tidak lepas dengan peran pencitraan, permainan peran menjadi modal penting dalam kontestasi politik. Untuk memenangkan kontestasi pilkada Jatim, kandidat dituntut untuk mempunyai keahlian khusus bermainan peran dalam panggung politik, kandidat harus mampu melakukan representasi diri sebagai aktor sejati untuk menarik perhatian massa dan dukungan pemilih. Dalam kontestasi pilkada Jatim Khofifah tidak bisa menjadi peran politikus seutuhnya, kandidat harus mampu memainkan berbagai peran sesuai kondisi yang dibutuhkan diantaranya, berperan sebagai santri, berperan sebagai tokoh/Kiai, dan berperan sebagai masyarakat biasa. Permainan peran tersebut dalam perspektif teori ilmu komunikasi biasa disebut dengan pendekatan dramaturgi.

Teori Dramaturgis, menjelaskan bahwa interaksi sosial dimaknai sama dengan pertunjukan teater. Manusia adalah aktor yang berusaha untuk menggabungkan karakteristik personal

dan tujuan kepada orang lain melalui "pertunjukan dramanya sendiri". Dalam mencapai tujuannya tersebut, menurut konsep dramaturgis, manusia akan mengembangkan perilaku-perilaku yang mendukung perannya tersebut. Oleh Goffman, tindakan diatas disebut dalam istilah "*impression management*". Goffman juga melihat bahwa ada perbedaan akting yang besar saat aktor berada di atas panggung ("*front stage*") dan di belakang panggung ("*back stage*") drama kehidupan. Kondisi akting di front stage adalah adanya penonton (yang melihat kita) dan kita sedang berada dalam bagian pertunjukan. (Arrianie 2010:35)

Begitu pula, pertunjukkan panggung politik pilkada tahun 2018 semakin signifikan. Pertunjukan pencitraan diri seorang figur yang sedang bertarung dalam kontestasi politik berdampak besar bagi elektabilitas mereka. Sosok yang populer bisa terjungkal jika salah sedikit saja dalam mencitrakan dirinya. Ini sekaligus membuktikan bahwa masyarakat pemilih semakin detail mengamati perilaku orang populer yang disebut sebagai calon pemimpin masa depan. Tak hanya individu, politik pencitraan juga berdampak besar bagi partai, pencitraan juga memiliki dampak negatif. Apalagi kalau dilakukan secara berlebihan demi menumpuk citra positif sebanyak mungkin dari masyarakat.

## Konstruksi Sosial (Peter L. Berger dan Thomas Luckman)

Kontestasi pilkada Jatim memberikan gambaran tentang tindakan para kandidat dalam mengkonstruksi realitas untuk memperoleh dukungan dari kaum

Nahdiyin dan upaya memperoleh suara yang signifikan, karena kandidat harus berlatarbelakang NU. Dalam perhelatan ini, untuk menghadapi rival kuat, pasangan Khofifah Indar Parawansa yang berpasangan dengan Emil Elestianto Dardak, perlu melakukan konstruksi komunikasi politik kepada masyarakat Jawa Timur (kaum Nahdhiyin) dalam menawarkan gagasan, konsep-konsep pembangunan.

Dari penjelasan diatas, peneliti akan menggunakan pendekatan teori Konstruksi Sosial yang dikembangkan oleh *Peter L.Berger* dan *Thomas Luckman* sebagai alat analisis. Secara umum, konsep pemikiran *Berger* dan *Luckmann* mengenai realitas sosial pada masyarakat adalah bahwa institusi masyarakat tercipta dan dipertahankan atau diubah melalui tindakan dan interaksi manusia.

Meskipun masyarakat dan institusi sosial terlihat nyata secara obyektif, namun pada kenyataan semuanya dibangun dalam definisi subjektif melalui proses interaksi. Objektivitas baru bisa terjadi melalui penegasan berulang-ulang yang diberikan oleh orang lain yang memiliki definisi subyektif yang sama. Pada tingkat generalitas yang paling tinggi, manusia menciptakan dunia dalam makna simbolis yang universal, yaitu pandangan hidupnya yang menyeluruh, yang memberi legitimasi dan mengatur bentuk-bentuk sosial serta memberi makna pada berbagai bidang kehidupannya.

Bagi *Berger* dan *Luckmann* masyarakat merupakan kenyataan objektif, dan sekaligus kenyataan subjektif. Sebagai kenyataan objektif, individu berada di luar diri manusia dan berhadap-hadapan

dengannya; sedangkan sebagai kenyataan subjektif, individu berada di dalam masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Individu adalah pembentuk masyarakat; dan masyarakat adalah pembentuk individu. Maka itu, kenyataan sosial bersifat ganda dan bukan tunggal, yaitu kenyataan objektif dan sekaligus subjektif (Bungin 2014:15).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma kontruktivis, dengan alasan, karena obyek yang akan teliti merupakan suatu realitas yang penuh dengan rekayasa politik. Paradigma kontruktivisme memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, tetapi terbentuk dari hasil konstruksi. Dalam perhelatan komunikasi politik panggung demokrasi pilkada, kedua kandidat sama-sama mengkonstruksi panggung politik dengan memanfaatkan background masing-masing kandidat yang berasal dari keluarga besar nahdhiyin, yang dipastikan sangat mendominasi tingkat suara pemilih di Jawa Timur.

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan alasan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang sedalam-dalamnya. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada persoalan (kualitas) data bukan pada banyaknya data/Kuantitas. (Kryantono2012:57).

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memahami teori dan wawasan yang luas sehingga bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti. Penelitian ini lebih

menekankan pada makna dan nilai. (Wahid 2016). Alasan penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena peneliti akan mengungkap, memperjelas, dan menggali makna secara mendalam tentang fenomena dibalik kontestasi para kandidat pilkada Jatim yang sama-sama mempunyai popularitas politik.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN Panggung Komunikasi Politik Kiai NU

Kontestasi politik NU, sangat menentukan peta persaingan Pilgub Jatim yang semakin hari semakin tergambar jelas. Persaingan calon muncul untuk mempertemukan kandidat yang sudah sejak lama menjadi buah bibir dan kerap menghiasi pemberitaan di media massa. Tapi, belum bisa di simpulkan, perhelatan Pilgub Jatim, dan ini hanya akan diikuti dua pasangan calon saja. Fenomena ini memunculkan isu partai koalisi akan mamunculkan nama kejutan sebagai poros tengah. Beberapa Partai diisukan akan mengusung kandidat baru untuk mewarnai kandidat pilkada Jatim. Pilkada Serentak Jawa Timur (Jatim) untuk memilih gubernur dan wakil gubernur. Tapi, keriuhan sudah mulai teras, ini karena para bakal calon (balon) merupakan orang-orang terkenal yang menjadi tokoh nasional dan juga berlatar belakang warga Nahdlatul Ulama (NU) atau Nahdliyin, merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia, yang sangat berpengaruh di Jatim, dan diprediksi pelaksanaan Pilkada Jatim akan sangat menarik.

NU dalam pilkada Jatim kali ini, mengusung yang kini menjabat Gubernur Jatim tidak lepas dari desakan sejumlah Kiai NU. Sedangkan yang lain juga berbasis

Nahdliyin justru untuk Pilkada Jatim cenderung mendukung pasangan Risma. Tapi, bukan berarti kecenderungan ini tak lepas dari perbedaan di akar rumput NU. Ada juga yang menginginkan Gus Ipul, tetapi kalau bicara daerah basis NU seperti Madura, lebih menghendaki Khofifah, ini yang harus dipertimbangkan. Khofifah meminta dukungan dari PPP karena bagaimanapun di Jatim itu PPP juga partai Nahdliyin, khofifah juga menginginkan untuk menunjukkan bahwa dia didukung oleh partai berbasis Nahdliyin. Risma-Gus Han dan pasangan Luluk-L.Hakim juga sudah deklarasi maju, mereka sama-sama berebut dukungan pengaruh NU, baik kiai maupun warga Nahdliyin.

Komunikasi Kiai NU Jawa Timur mendukung pasangan masing-masing calon agar bisa memenangi Pilkada Jatim. Pasangan yang diusung partai dinilai merepresentasikan warga Jawa Timur . Dukungan itu diberikan, karena Jawa Timur membutuhkan kader NU tulen. NU harus tetap menjaga kebersamaan dan kekompakan demi kemaslahatan umat. Mereka sepakat dengan para kiai dan pengasuh ponpes bahwa kader NU harus mampu berbagi peran dalam jabatan politik, baik di legislatif, eksekutif, maupun jabatan-jabatan strategis di pemerintah pusat maupun daerah. Keputusan itu, sejalan dengan para kiai dan pengasuh pesantren di Jatim untuk mendukung dan mepercayakan sepenuhnya kepada kandidat menjadi calon gubernur dalam Pilkada. Di Jawa Timur Kiai sangat berperan penting.

Pergerakan para Kiai dalam dunia politik telah menorehkan jejak panjang NU. Jejak itu bahkan telah ditapakkan sejak

zaman kolonial Belanda. Didirikannya NU, tidak hanya didorong untuk mempertahankan paham ahlussunah wal jama'ah namun juga motif nasionalisme untuk melakukan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Pergerakan politik para kiai itu kemudian berlanjut sampai pada masa kemerdekaan. NU bahkan sempat menjadi partai politik tersendiri setelah sebelumnya bergabung dalam partai politik Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), kemudian pindah haluan ke PKB. Sinergitas yang kuat antara Nahdlatul Ulama (NU) sebagai sebuah organisasi sosial keagamaan dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai sebuah partai politik, artinya PKB membutuhkan organisasi Nahdlatul Ulama (NU), begitu pula sebaliknya.

NU tanpa pedang politik PKB tidak akan bisa ampuh, tidak memiliki tangan-tangan untuk perpanjangan. Begitu pula PKB tanpa spirit NU, politik jadi pasar transaksional belaka. Untuk itu, NU membutuhkan PKB, begitu pula sebaliknya. Hal ini merupakan isyarat perlunya dukungan solid partai dari para kalangan nahdliyin. PKB adalah satu-satunya partai yang AD/ART-nya senafas dengan NU. Dalam perjalanan politiknya, PKB mampu memperoleh dukungan rakyat dalam jumlah yang cukup signifikan. Keberhasilan tersebut diharapkan terulang lagi dalam pilkada Jawa Timur.

Panggung politik pilkada Jawa Timur tidak hanya menyuguhkan manuver politik tokoh dan partai politik, tetapi ulama, kiai juga mengambil bagian dalam pesta demokrasi lima tahunan. Peranan kyai mengingatkan publik, terhadap puluhan Kiai Nahdlatul Ulama (NU) yang mengirim

surat kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jatim pada beberapa waktu yang lalu. Surat tersebut meminta PKB agar melibatkan kiai dalam pengambilan keputusan politik tentang figur yang akan diusung pada Pilkada Jatim. Kemudian di Sidoarjo, ratusan kiai mendeklarasikan pencalonan Luluk-Lukman sebagai cagub pada Pilkada Jatim, yang diusung PKB. Pada tahun 2024

Manuver politik juga dilakukan kelompok kiai yang menamakan dirinya Forum Kiai Kampung. Kelompok ini sempat mengirim surat kepada Presiden Jokowi agar segera mengizinkan Khofifah Indar Parawansah (Menteri Sosial) untuk bertarung pada Pilkada Jatim tahun depan. Belakangan, kelompok kiai ini berubah haluan dan tiba-tiba menggelar deklarasi mendukung Gus Ipul pada Pilkada Jatim. Kubu Khofifah juga tidak menginginkan jauh dari simbol kiai. Bahkan, Ketua Umum Muslimat NU itu menyerahkan nama wakilnya kepada Tim 9 yang berisi para kiai senior. Setelah Tim 9 menentukan nama calon wakil Khofifah, selanjutnya dikomunikasikan dengan partai pendukung.

Melihat fenomena seperti ini, mesin partai dari masing-masing pengusung memang harus bekerja ekstra keras, terutama untuk meyakinkan para tokoh NU di wilayah Jatim dalam menggalang dukungan kepada salah satu calon saja. Jawa Timur (Jatim) sejak zaman dahulu merupakan basis terkuat warga *nahdliyyin*, karena Nahdlatul Ulama (NU) sejatinya lahir dan besar di wilayah Jawa Timur. Untuk itu karisma NU harus melekat pada seseorang yang ingin meniti karir dalam puncak kekuasaan, seperti

bupati, walikota, terlebih bila mau maju sebagai calon gubernur. Latar belakang partai politik (parpol) terkadang tidak begitu terpengaruh bagi calon kandidat, melainkan kendedekatan atau afiliasi dengan ormas Islam terbesar/NU. K

Belajar dari pilkada sebelumnya, ketika para kandidat mengincar kursi kekuasaan menjadi gubernur dan wakil gubernur. Warga *nahdliyin* akan lebih bulat dan kesempatan keduanya menang dari pasangan lainnya cenderung lebih besar, walaupun diusung dari partai yang berbeda. Sesuai dengan mekanisme untuk ikut dalam kontestasi politik tetap melalui dukungan parpol, karena dipastikan calon yang berasal dari jalur independen terlambat berat untuk terjun dalam ajang kontestasi politik. Seperti yang dilakukan oleh kedua calon, merupakan representasi politik NU. Para kandidat secara resmi akan mendaftar melalui jalur parpol yang mempunyai hubungan erat dengan NU. Untuk memetakan kekuatan Nahdiyyin untuk para kandidat yang bersaing harus melihat dulu kultur pemilih di Jatim.

Kontestasi NU sebagai ormas sangat menarik, karena ikatan solidaritas sosial didalamnya secara kultural bisa sangat kuat, meskipun secara politik, mereka bisa memiliki afiliasi dengan parpol manapun. PKB merupakan cermin dari kendaraan politik NU, belum tentu sebagai representasi sesungguhnya kalangan *nahdliyin*. Ini terbukti, kekuatan PKB di Jatim mengusung Khofifah dua kali gagal membawa Ketua Muslimat NU ini menjadi orang nomor satu di Jatim.

Faktor ini yang membuat Khofifah tidak lagi memanfaatkan PKB sebagai kendaraan politiknya, tetapi hijrah ke

Partai Demokrat, yang sebelumnya menjadi parpol yang memuluskan Soekarwo ke kursi gubernur. Kemungkinan Khofifah kapok setelah dua kali gagal diusung PKB sehingga mencari keberuntungan lewat parpol lain, atau memang ciri khas NU yang akomodatif terhadap banyak afiliasi politik.

Untuk melawan kandidat pasangan terkuat di kalangan NU, kandidat berpengaruh di Jawa Timur menjadi poros tengah diantaranya Yenny wahid, La nyala mataliti, Tri Risma dan Luluk Nama-nama tersebut dianggap bisa mengimbangi percaturan politik Jatim. Adanya isu poros tengah sangat mencerminkan tingkat kedewasaan politik pilkada Jatim. Kontestasi politik Jatim terjadi perubahan yang sangat mengejutkan.

Peristiwa ini mengingatkan pada sejarah Pilkda 2018, ketika Anas sebagai pasangan Gus Ipul diusulkan mengundurkan diri, karena terjerat kasus foto panas. Peristiwa tersebut membuat PDI semakin panik untuk mencari pengganti Anas. Untuk memperoleh kandidat yang bisa mewakili partai, kebijakan dan sistem demokrasi di dalam partai harus diwujudkan berdasarkan kesepakatan. Sementara itu, waktu yang sangat singkat untuk pendaftaran paslon menuntut PDI segera menemukan pengganti Anas. Garindra, PAN, PKS gagal mengusung poros tengah, dengan alasan situasi yang terlalu singkat tidak memungkinkan.

Pada tanggal 10 Januari 2018 PDI belum juga mendeklarasikan kandidat pengganti Anas, pasangan Gus Ipul baru datang ke KPU pada malam tanggal 10 januari. Pada akhirnya partai PDI dan Gerindra resmi mengusung Saifullah

Yusuf (Gus Ipul)-Puti Guntur Soekarno di Pilgub Jawa Timur 2018. Perwakilan partai besutan Prabowo Subianto ini akan ikut mendampingi Gus Ipul-Puti mendaftar ke KPU Jatim. Berdasarkan jadwal yang sudah ditentukan, tahapan pendaftaran pasangan calon (paslon) pada 8-10 Januari 2018. Penetapan paslon pada 12 Februari. Masa kampanye dimulai 15 Februari-23 Juni 2018 dan masa tenang 24-26 Juni. Pilkada Jatim selalu memberikan kejutan terhadap publik, cukup sulit untuk diprediksi kebijakan partai koalisi kandidat mempunyai atmosfer beraneka ragam. Kebijakan PDI memilih Puti Guntur Soekarno, merupakan bentuk demokrasi koalisi partai yang harus diselaraskan. Atmosfer pilkada Jatim sangat mencerminkan demokrasi politik daerah dengan kultur khas Nahdiyyin, karena dengan demokrasi masyarakat merasa diberikan haknya sebagai warga negara.

Khoirul Yahya, Kompas (18/11/2017), pakar politik Islam dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, menilai, partisipasi aktif ulama dalam panggung politik karena secara politik peran ulama dinilai sangat potensial sebagai panutan dan rujukan masyarakat dalam menentukan pilihan. Namun, dia melihat ada pergeseran nilai fungsi ulama, khususnya saat momentum Pilkada Jatim. Banyak ulama yang lupa bahwa mereka memakai baju kenabian yang bertindak untuk kemaslahatan umat, bukan untuk dirinya secara pribadi.

Berdasarkan uraian diatas, sangat relevan dengan sebuah dalil yang menegaskan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا فَوَّا مِنْ لِلَّهِ شَهَادَةً  
بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى الَّا  
تَعْدِلُوا إِنَّمَا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ  
اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan."

Ayat ini mengingatkan para pemimpin untuk senantiasa berlaku adil. Dalam Kitab Tafsir Al-Khawatir karya Syekh Mutawalli As-Sya'rawi dijelaskan bahwa sikap adil ini berlalu bagi setiap individu, bahkan dalam menentukan keputusan hukum untuk hal-hal yang terlihat sepele. Kapan dan di mana pun, ayat ini sangat relevan untuk dijadikan pegangan oleh mereka yang memiliki wewenang dalam menetapkan keputusan hukum atau sebagai penguasa /pemerintah. Sementara itu, menurut Ketua Umum DPP PKB Muhammin Iskandar pada pilkda sebelumnya, dua kali kekalahan Khofifah diharapkan tidak membawa efek buruk bagi warga Nahdiyyin Jawa Timur. Warga NU pecah, satu sama lain saling curiga, bermusuhan. Sebab, Khofifa tidak dan Gus Ipul sama-sama representasi dari NU. Bahkan, Muhammin pada tahun ini pernah meminta keluarga besar NU bersatu agar Khofifah tak maju dalam Pilkada Jatim. Dalam proses demokrasi apapun bisa terjadi, namun harapan pimpinan politik NU, keluarga besar NU bersatu, supaya Khofifah tidak perlu maju dalam Pilkada Jatim 2018.

Untuk 2024 Agar bisa memetakan kelompok dan pendukung kandidat, sebelumnya harus menilik terlebih dahulu latar belakang para kandidat yang bersaing. Jika menilik latarbelakang kandidat telah mendeklarasikan diri maju sebagai Cagub Jatim 2018, keduanya merupakan santri NU. Keduanya adalah tokoh-tokoh penting dalam jajaran elit Nahdlatul Ulama. NU diharapkan bisa memberikan energi positif di Jawa Timur terkait pesta demokrasi Pilkada.

Pilkada merupakan ajang pesta demokrasi yang harus diikuti oleh semua kalangan masyarakat tanpa terkecuali dan sudah memenuhi syarat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor (UU) 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). UU ini menegaskan bahwa, Pemilu dilaksanakan berdasarkan atas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta memenuhi prinsip; mandiri, jujur, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien. Jawa Timur merupakan provinsi terbesar kedua di Indonesia setelah Jawa Barat, sehingga sangat wajar kalau provinsi ini selalu disebut sebagai barometer politik nasional yang selalu memegang peran sangat penting dalam mempengaruhi peta politik nasional. Pilkada bertujuan untuk menciptakan suasana dan sistem demokrasi yang dewasa dalam memilih pemimpin daerah. Sinergitas keterwakilan antara masyarakat dan kepala daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas yang bertanggungjawab dan tercipta pemerintahan daerah yang mempunyai kredibilitas dan akuntabilitas secara nyata sebagai wakil rakyat. (*Undang-Undang Pilkada, Nomor 7 Tahun 2017*)

Panggung demokrasi komunikasi politik Pilkada, secara serentak akan selalu hadir, sekaligus sebagai sarana untuk menguatkan konsolidasi demokrasi lokal/daerah. Pertarungan panggung politik Pilkada perlu didukung oleh mesin politik dan popularitas figur. Yang akan menjadi faktor dan dipercaya sangat menentukan sukses tidaknya kandidat dalam meraih kursi kekuasaan yaitu mesin politik.

Selama ini popularitas figur jauh lebih menentukan kemenangan politik ketimbang kerja mesin politik, meski bukan mutlak berlaku untuk setiap pilkada. Karena jika popularitas figur kuat, maka mesin politik bisa dibangun dengan mudah. Panggung demokrasi pilkada, selalu menjadi isu hangat, para dalang politik sudah mempersiapkan aktor mereka masing-masing dibelakang layar, yang sudah diskenario untuk menjadi pemain utama dalam panggung politik pilkada, layaknya gatot koco yang siap bertarung untuk mengalahkan lawan-lawannya, dan Para dalang pun sudah siap menunggu gendang ditabuh oleh KPU.

Untuk memperoleh suara yang signifikan, dapat diciptakan oleh popularitas figur yang didukung oleh struktur pasar politik serta kebijakan publik, memungkinkan akan membawa figur lebih populer, dan bisa dianalogikan sebagai penjual atau market politik dalam menawarkan visi, misi dan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat pemilih sebagai pembeli akan menentukan politik pada tawaran kebijakan yang pro-rakyat. Dalam skenario demokrasi dengan sistem pemilihan *one man one vote*, tidak dapat disangkal popularitas figur menjadi senjata yang ampuh bagi

kemenangan pemilu dengan dukungan politik kebijakan sebagai perekatnya yang menggoda.

Rekayasa politik melalui Program yang sederhana oleh aktor yang cerdas bisa menjadi sesuatu yang sangat istimewa, jika itu disampaikan secara heroik lewat narasi-narasi dan gaya bahasa politik oleh figur yang memikat, sehingga mampu menyedot selera politik rakyat. Betapapun hebatnya topeng politik melalui kebijakan yang ditawarkan kepada publik dengan skenario pemasaran politik yang tepat, tetapi jika figur kandidat tidak memiliki daya tarik, pesona, popularitas dan kharisma yang bisa menarik selera politik rakyat, maka semuanya akan terasa hambar, karena itu akan terasa sulit untuk mendapatkan hati pembeli atau penonton politik (pemilih). Melalui pemilihan kepala daerah serentak, publik kembali diuji untuk memilih kepala daerah yang dapat membawa perubahan.

Dibalik berbagai pertentangan, keriuhan, dan kemerahan, pilkada menjadi wadah pembelajaran demokrasi publik. Suhu politik di tanah air semakin menghangat menjelang perhelatan pilkada serentak diseluruh Indonesia. Jika belajar dari Pilkada DKI 2017 sebagai pesta demokrasi telah diciderai dengan berbagai warnapolitik identitas, isu yang diciptakan merebak berbagai berita sesat yang memecah belah persatuan rakyat tidak hanya di Jakarta namun juga di seluruh Indonesia. Warga Jakarta mulai disetir dengan cara dikotak-kotakan, berbagai isu yang mewakili identitas primordial kandidat tertentu, begitu hangatnya diperbincangkan publik. Pemetaan kelompok identitas yang berdasarkan suku, agama, dan etnis, pun menjadi

taksasi kemenangan politik yang telah ditakar berbagai kalangan, mulai dari pengamat politik hingga rakyat biasa. Titik klimaksnya pada Islam non Islam, pribumi non pribumi, menjadikan gesekan yang sangat kuat pada publik untuk memilih calon Gubernur DKI tertentu berdasarkan identitas promordialnya.

Dalam Pilkada DKI hantaman yang sangat kuat diarahkan pada figur calon gubernur petahana Ahok-Djarot, khususnya Ahok yang di cap sebagai etnis China dan non muslim. Disini Pancasila yang sebagai ideologi dan pandangan bangsa Indonesia untuk berfikir dan bertingkah laku dalam pesta demokrasi telah dikesampingkan. Lunturnya Pancasila melalui Pilkada yang di bumbui Politik Identitas untuk memecah belah persatuan dan kesatuan teramat sangat nyata dirasakan.

Kontestasi politik pilkada jatim semakin menarik karena narasi politik sudah dimulai oleh media massa yang dimainkan para aktor politik dengan berbagai aksinya dan pesan-pesan persuasif akan menjadi tujuan utama pada setiap kandidat. Saat ini ada tiga santri di panggung politik Pilkada Jawa Timur (Jatim) 2018 dan pada 2024 juga ada tiga kandidat Srikandi Jawa Timur. Mereka adalah pasangan bakal cagub dan cawagub yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yaitu Luluk dan Lukman dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yaitu Risma dan Gus Han Serta Khofifah dari Gerindra. Mereka semua didukung oleh para Kiai besar dalam lingkungan Nahdatul Ulama (NU) yang notabene merupakan kaum Nahdliyin.

Hal ini menjadi warna tersendiri bagi pilkada jatim sebagai politik pesantren.

Para kandidat yang didukung para Kiai akan bertarung untuk merebut suara di Pilkada Jatim yang dikenal gudangnya pesantren. Dalam merebut suara itu bagian dari demokrasi.

Demokrasi dalam konstelasi komunikasi politik memiliki arti yang sangat penting terutama di era reformasi sekarang ini. Iklim keterbukaan dan demokratisasi yang kita bangun, desentralisasi dan otonomi daerah serta pemilihan kepala daerah yang juga nantinya dilakukan secara langsung akan semakin menambah pentingnya arti komunikasi politik di Indonesia.

Komunikasi politik dalam pemilukada merupakan suatu proses penyampaian pesan, proses dimana informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem politik pada bagian lainnya dan diantara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik. Proses ini berlangsung disemua tingkat masyarakat disetiap tempat yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi diantara individu-individu dengan berbagai kelompok.

Dalam panggung politik, pesan-pesan persuasi mulai menggoda para pemilih baik secara langsung maupun melalui media, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kehidupan demokratis telah membuat elite politik menempuh kendaraan politik popularitas sebagai jalan utama untuk meraih dan merengkuh suara rakyat. Popularitas figur lebih berpengaruh ketimbang mesin politik, tetapi peran mesin politik tidak bisa diabaikan.

Di negara demokratis, segala tema kampanye, beserta isu-isu politik yang menyentuh massa politik lebih berhasil jika itu dilakukan oleh mesin politik

yang terorganisir dengan baik. Artinya, lewat panggung politik, aktor sanggup membangun narasi politik dengan visi, misi dan program kerja yang dapat merayu suara hati rakyat.

## KESIMPULAN

Melalui kontestasi panggung politik kandidat merupakan aktor utama dan pemilih sebagai penonton. Komunikator politik akan sangat lihai berperan, bahkan dengan mudah aktor/kandidat yang populer bisa mengikat massa politik untuk menggerakkan mesin politik. Kedahsyatan popularitas figur lebih tinggi pengaruhnya dalam panggung politik, figur yang populer dan karismatik akan mampu menjelma seperti pahlawan (heroik) sebagai alat komunikasi yang jitu dalam upaya pemenangan kontestasi.

Konsep dramaturgi dan permainan peran yang dilakukan oleh para kandidat, menciptakan suasana dan kondisi interaksi yang kemudian memberikan makna tersendiri bagi masyarakat. Munculnya pemaknaan ini sangat tergantung pada latar belakang sosial masyarakat itu sendiri dan terbentuk masyarakat yang mampu beradaptasi dengan berbagai suasana, corak kehidupan politik.

Seiring dengan diselenggarakannya pilkada, para kandidat belomba-lomba memperoleh perhatian masyarakat untuk mengkonstruksi pencitraan yang dikolaborasi dengan simbol-simbol verbal, nonverbal untuk menciptakan makna pesan politik, yang secara sengaja dibentuk dalam permainan peran.

Konstruksi sosial politik dibentuk sedemikian rupa agar permainan politik sesuai dengan rencana yang sudah

direkayasa. Pilkada merupakan kontestasi kedua dalam panggung politik setelah pemilihan presiden, yang akan menentukan masa depan politik dan masyarakat. Pilkada yang didominasi dukungan kaum nahdhiyin akan mencerminkan politik Jawa Timur dan barometer politik nasional.

Dari perjalanan politik sebelumnya, NU yang dimediasi oleh PKB dengan latarbelakang Nahdliyin sudah mantap mendukung kandidatnya. Pilihan ini tak lepas dari rekam jejak Khofifah yang sudah dua kali kalah pada Pilkada Jatim 2008 dan 2013. Bahkan, pada Pilkada 2013 Khofifah diusung oleh PKB. Khofifah pada waktu itu dikalahkan Soekarwo-Gus Ipul yang diusung oleh sejumlah partai nasionalis dan partai Islam, seperti PKS. Calon yang sudah melakukan deklarasi untuk maju, yaitu pasangan Saifullah Yusuf yang saat ini menjabat wakil gubernur Jatim didukung PDIP dan PKB.

Sedangkan, saingan keduanya Khofifah Indar Parawansa, juga dari latarbelakang NU diusung oleh Partai Golkar, sedang menjabat sebagai menteri sosial dan ketua umum Muslimat, organisasi perempuan NU. Gerindra sudah menaruh perhatian terhadap khofifah, Partai Prabowo Subianto mengaku lebih melirik Khofifah ketimbang Saifullah Yusuf (Gus Ipul) untuk dijagokan dalam pesta demokrasi Jatim tahun 2018. Sementara itu di 2024 PKB mengusung Luluk-Lukman sebagai kandidatnya. Dengan demikian, representasi para kandidat, semakin memunculkan penasaran dalam kontestasi politik pilkada Jawa Timur, karena pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Timur (Jatim) tak lepas dari peranan Kiai dan kaum Nahdliyin. Tokoh

Nahdlatul Ulama selalu mendominasi pusaran isu sekitar Pilgub di Jawa Timur yang sangat representatif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hamdi 2013, Partai Politik Islam, Teori & Praktik di Indonesia, Graaha Ilmu, Yogyakarta
- Arrianie 2010, Komunikasi Politik, Politik dan Pencintaan di Panggung Politik, Widya Padjajaran, Bandung
- Bungin Burhan 2015, Konstruksi Sosial Media Massa; Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi Dan Keputusan Konsumen Serta Kritik Terhadap Peter Berger & Thomas Luckmann, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Creswell 2017 Research Design, Mix Method, (Edisi Transilte), Pustaka Pelajar, Yogjakarta
- Charon 2007 Symbolic Interaction, Pearson Education, London
- Denzin & Lincoln 2009 Qualitative Research (Edisi Translite) Pustaka Pelajar, Jogjakarta
- Hikmat 2010, Komunikasi Politik, Teori dan Praktek, Simbiosa Rakatama Media, Bandung
- Kusworo Engkus 2009, Fenomenologi, Widya Padjajaran Bandung
- Parawansah Khofifah 2013, Islam, NU, Keindonesiaan, Nuansa Cendekia, Bandung
- Kryantono 2012, Riset Komunikasi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Muhtadi 2008, Komunikasi Politik Indonesia, PT Remaja Rosdakarya, Bandung

Subiakto & Ida 2014 Komunikasi Politik  
Media & Demokrasi, Kenacana  
Prenada Media Group, Jakarta.

Wahid 2016, Komunikasi Politik, Teori,  
Konsep, Dan Aplikasi Dalam  
Media Baru, Simbiosa Rekatama  
Media, Bandung

Undang-Undang RI Nomor 7 2017 -  
P e m i l i h a n U m u m N o .  
ISBN9786026795267

Penerbit : Pustaka Yustisia  
Media Harian Senin, (Surya,22/12/2017).  
Media Harian Kompas (18/11/2017),  
<http://setkab.go.id/iinilah-undang-undang-nomor-7-tahun-2017>.